

## WACANA PEMBANGUNAN MELALUI PENGGALIAN NILAI BUDAYA

T. Sihol Nababan<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas HKBP Nommensen, Medan

### ABSTRACT

*The study of culture-development value, i.e. "the study of worldview-work ethos" should find the culture values including work ethos and worldview that applied and have the process of mentality and intelligence creation to increase the quality of life, to find how the culture values can be reinterpreted so that have the functional value to gain the prosperity. Besides, it is also hoped to find the individual and society group as the target of programs of culture value interpretation, so that the changes become effective and efficient. The study is the continuation study that succeed in finding the existence of difference between economic and society development, and also the linkage of culture value based on religious values and work ethos.*

**Keywords:** *culture values, economic development, society development, worldview, work-ethos.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan diartikan sebagai seperangkat upaya meningkatkan kesejahteraan hidup warga masyarakat secara terencana yang dilaksanakan oleh pemerintahan, badan-badan atau lembaga-lembaga (internasional, nasional, lokal) yang terwujud dalam bentuk program-program mengubah cara hidup atau kebudayaan masyarakat tersebut. Jadi terdapat dua kata kunci dalam pembangunan, pertama adalah peningkatan kesejahteraan hidup dan kedua adalah mengubah cara hidup atau kebudayaan suatu masyarakat. Peningkatan kesejahteraan hidup menjadi kata kunci pembangunan sebab merupakan arah, tujuan, sasaran, sekaligus idealita pembangunan. Boleh dikatakan fokus pembangunan terdapat pada tujuan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan hidup. Adapun mengubah cara hidup atau kebudayaan suatu masyarakat menjadi kata kunci karena perubahan cara hidup atau kebudayaan menjadi alat pembangunan. Masyarakat harus mandiri dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan

tidak tergantung pada orang lain. Di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai hidup atau kebudayaan yang mampu mendorong meningkatkan kesejahteraan hidup dan ada yang tidak dapat digunakan mendorong pencapaian kesejahteraan hidup. Program-program pembangunan diarahkan supaya masyarakat mampu menggunakan seluruh nilai-nilai hidup atau kebudayaan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Dalam perspektif seperti itu, terdapat berbagai perbedaan pendapat mengenai pembangunan. Pertama apa yang dimaksudkan dengan taraf hidup dan kesejahteraan hidup. Pembahasan itu biasanya dikemas dalam pemaknaan terhadap pembangunan, apakah pembangunan itu dalam arti luas, pembangunan ekonomi, atau bahkan westernisasi. Kedua adalah pembahasan keuniversalan nilai-nilai religiusitas di tengah masyarakat dalam menumbuhkan etos kerja dan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan.

Tulisan ini bermaksud menguraikan berbagai wacana di sekeliling hubungan antara

pembangunan dan nilai-nilai budaya yang bersumber dari religiusitas. Pada bagian kedua diuraikan wacana mengenai kesejahteraan hidup dan pembangunan, sedangkan pada bagian ketiga diuraikan wacana nilai-nilai budaya religiusitas. Pada bagian keempat diuraikan kemungkinan pencermatan yang dapat dilakukan pada masa yang akan datang.

### PEMBANGUNAN EKONOMI ATAU PEMBANGUNAN MASYARAKAT?

Terdapat dua kutub saling bertolak belakang yang membahas substansi pembangunan dan perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik yang dapat menyentuh kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal itu juga mungkin disebabkan tradisi berfikir dan tradisi keilmuan yang berbeda. Kutub pembangunan ekonomi banyak dikemukakan oleh eksponen *positivisme* dalam ilmu ekonomi. Sedangkan kutub pembangunan masyarakat dikemukakan oleh eksponen '*idealisme*' dalam ilmu sosial nonilmu ekonomi.

Pembangunan ekonomi sebagai tujuan pembangunan sebenarnya merupakan 'revisi mendasar' terhadap tujuan pembangunan yang sebelumnya banyak dikemukakan para ekonom. Pertumbuhan ekonomi tidak ideal sebagai tujuan pembangunan, sebab hanya menyangkut sedikit aspek dalam ekonomi, yaitu peningkatan output (perkapita dan jangka panjang). Yang ideal sebagai tujuan pembangunan adalah pembangunan ekonomi sebab menyangkut seluruh aspek ekonomi, bahkan juga seluruh aspek kehidupan manusia. Akan tetapi banyak juga kalangan ekonom yang memandang bahwa tidak ada dikotomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, yang benar substansi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, Meier (1995) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dimana aspek lain dari ekonomi, yaitu jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan

distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Dalam definisi tersebut terkandung aspek nonekonomi karena proses mencakup berlangsungnya kekuatan-kekuatan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan perubahan kelembagaan. Sedangkan Abdul Hakim (2002:7) memberikan definisi bahwa pembangunan berurusan dengan mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional, baik di sektor swasta maupun pemerintah untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat, supaya hasil-hasil pembangunan bisa dicapai dengan cara yang paling efisien untuk dibagikan kepada rakyat banyak. Adapun Kuncoro (1997) demikian juga Arsyad (1999) memandang bahwa kemakmuran suatu negara sebagai akibat dari keberhasilan suatu proses pembangunan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indikator-indikator kemakmuran atau indikator-indikator pembangunan. Indikator-indikator tersebut terdiri dari indikator ekonomi yaitu GNP per kapita dengan *purchasing power parity* serta indikator sosial yang meliputi : 1) *physical quality life index* (indeks mutu hidup), 2) *human development index* (indeks pembangunan manusia). Bahkan UNRISHD (*United Nations Research Institute on Social Development*) secara lebih luas telah mengembangkan indikator sosial-ekonomi ini dengan memasukkan unsur-unsur seperti: harapan hidup, tingkat konsumsi, pendidikan, perdagangan luar negeri, pariwisata, sirkulasi surat kabar, produksi pertanian, pemilikan telepon, dan lain-lain. Ingham (1993 : p.1803) mengemukakan empat bentuk utama pembangunan, yaitu: 1) *structural change*, 2) *political change*, 3) *sustainable development*, dan 4) *modernization*. Pembangunan dalam bentuk *structural change* (perubahan structural) adalah pembangunan yang mengakibatkan perubahan dari *sektor pertanian* menjadi *industrialisasi*. Pembangunan dalam bentuk *political change* berarti adanya proses *demokratisasi* yang memberikan kebebasan pada individu dan perluasan pilihan ekonomi:

**“where economic liberty does not exist, political liberty does not matter ; where economic liberty exists, politic liberty matters”**. Pembangunan dalam bentuk *sustainable development* adalah pembangunan yang memperhatikan atau berbasis lingkungan melalui proteksi-proteksi konservasi lingkungan. Sedangkan pembangunan dalam bentuk *modernization* berarti adanya transformasi yang lengkap (*complete transformation*) dari kehidupan ekonomi, kultural (budaya), sosial dan politik ke arah yang lebih maju. Dalam konteks *modernisasi* ini, Ingham menyatakan:

*“Modernization is a broad social science concept and many of its critics adopt a social science perspective. In economic terms, modernization implies industrialization and urbanization and the technological transformation of agriculture. Socially, it involves the weakening of traditional ties, and the rise of achievement as the basis for personal advancement. Its political dimensions is in the rationalization of authority and the growth of the bureaucracy. Culturally, modernization is represented by increased secularization of society arising from the spread of scientific knowledge. Taken together, modernization means change toward those types of economic and political systems that developed in Western Europe and North America in the 18<sup>th</sup> and 19<sup>th</sup> centuries. Modernization is closely identified in the eyes of its critics with Westernization”*.

Adapun kubu pembangunan masyarakat memandang bahwa pembangunan tidak dapat dilihat hanya dari pengertian sempit saja yaitu pembangunan aspek ekonomi, tetapi harus dilihat secara luas dalam konteks pembangunan masyarakat (*community development*). Pembangunan masyarakat mencakup semua aspek kehidupan masyarakat yang membuatnya menjadi makhluk sosial. Aspek-aspek kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, teknologi, hubungan internasional, dan

globalisasi. Maskun (1994: xii) menyatakan bahwa wujud pembangunan masyarakat dijemakan dalam bentuk penciptaan kesejahteraan masyarakat dengan isu-isu pengentasan kemiskinan, hak azasi manusia, demokratisasi, kelestarian lingkungan sampai kepada masalah-masalah ketertiban umum dan stabilitas politik. Bahkan menurut Murtopo (1982:34) untuk mencapai kondisi-kondisi pembangunan nasional, maka yang menjadi syarat utama adalah stabilitas dan keamanan nasional yang digunakan untuk mempertahankan kelangsungan proses-proses keputusan-keputusan dalam pembangunan.

Selanjutnya Ferguson dan Dickens (2001: p.237) memberikan pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai berikut:

*“Community development is asset building that improves the quality of life among residents of low-to moderate-income communities, where communities are defined as neighborhoods or multi-neighborhood area. Relevant asset are social, intellectual, physical, financial or political. There are six major sectors of community development activity : housing, organizing and advocacy, business development, employment, safety and education”*.

Gittel dan Vidal (2001 : p.344), demikian juga Saegert, Thompson, Warren (2003 : p.95) lebih menekankan praktik *community development* pada bentuk penciptaan *social capital* melalui pengorganisasian masyarakat. Gittel dan Vidal menuturkan:

*“Community organizing is an essential ingredient of community development. A critical problem faced nationally is how to support community-based organizations and citizen participation in deteriorating, low income, underfunded neighborhoods where little or no such activity has occurred previously. ....the objectives of concensus organizing are : to develop neighborhood leadership, organize community-based and controlled organizations, and facilitate*

*respectful and mutually beneficial relationships between neighborhoods-based leaders and organizations and the larger metropolitan-area support community”.*

Kemudian, Pretty (1995:p.1252) menekankan *pembangunan masyarakat* dalam bentuk *participatory learning (pembelajaran partisipatoris)* yaitu bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program-program dan proyek-proyek pembangunan. Pretty mengemukakan ada tujuh tipologi partisipasi tersebut, yaitu:

- 1). *Manipulative participation*, yaitu partisipasi pura-pura dengan adanya wakil (*representative*) dari masyarakat pada dewan pemerintahan tetapi tidak memiliki kekuatan.
- 2). *Passive participation*, yaitu partisipasi pasif dimana masyarakat hanya sekedar pemenuhan administrasi saja tanpa didengar pendapatnya.
- 3). *Participation by consultation*, yaitu melibatkan masyarakat melalui konsultasi-konsultasi yang harus diperhatikan atau didengar.
- 4). *Participation by material incentives*, yaitu partisipasi masyarakat dengan mengharapkan insentif, seperti penyediaan tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain.
- 5). *Functional participation*, yaitu partisipasi masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok kerja untuk membantu pencapaian tujuan proyek.
- 6). *Interactive participation*, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam membuat analisis, perencanaan secara bersama-sama melalui lembaga-lembaga lokal.
- 7). *Self-mobilization*, yaitu masyarakat berpartisipasi dengan inisiatif sendiri secara bebas yang bersifat eksternal dengan tujuan untuk merubah sistem yang lebih menekankan pemerataan, seperti lembaga swadaya masyarakat.

Di Indonesia, pembangunan masyarakat lebih ditekankan pada bentuk pembangunan

masyarakat desa (*rural community development*) yang menekankan pada pemecahan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat desa, direncanakan dan diselesaikan secara bersama-sama, untuk memenuhi keinginan mereka (Surjadi, 1983 ; Maskun, 1994). Menurut Surjadi (1983:22-23) masalah pembangunan masyarakat adalah bagaimana menemukan cara-cara efektif untuk merangsang, menolong dan mengajar orang-orang untuk menggunakan metode-metode baru dan untuk mempelajari keahlian/ketrampilan baru, menolong orang untuk menyesuaikan cara hidup mereka kepada perubahan-perubahan yang mereka terima. Tetapi dalam praktiknya, pembangunan masyarakat dipahami sebagai bagaimana masyarakat bisa dibangun dari luar oleh setiap lembaga nasional/internasional, pemerintah ataupun swasta. Masyarakat di desa tradisional merasa bahwa mereka saling terikat dan perasaan saling terikat inilah yang menyebabkan mereka mematuhi norma-norma masyarakat bersama-sama dan bertingkah laku.

Selanjutnya, Kalangie (1999:3) menekankan pembangunan masyarakat melalui bentuk pembangunan sosial. Menurutnya, pembangunan sosial bertujuan untuk memampukan masyarakat dan individu untuk sedapat mungkin menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi intelektual, kerohanian, kognisi dan mental. Potensi-potensi ini dimungkinkan jika telah terjadi kondisi kualitas hidup memuaskan yang menyangkut faktor-faktor keadilan sosial dan individual, ketertiban hukum, keamanan atau ketenteraman, dan kelayakan hidup ekonomi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pengertian dan bentuk pembangunan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kutub pembangunan ekonomi berpendapat bahwa tujuan pembangunan terletak pada pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh indikator ekonomi dan indikator sosial lainnya. Adapun kutub pembangunan masyarakat berpendapat bahwa diperlukan perubahan-perubahan yang bersifat kultural (budaya), struktural, politik,

partisipatif, dan berkesinambungan, menuju kualitas hidup yang lebih baik.

## MENGGALI NILAI BUDAYA DAN MENINGKATKAN ETOS KERJA

E. B. Taylor (1871) dalam bukunya *Primitive Culture* mendefinisikan *kebudayaan* sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara lebih terperinci, Kuntjaraningrat (1974) membagi kebudayaan menjadi unsur-unsur yang terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi dan peralatan. Sedangkan menurut Ashley Montagu (1961), suatu kebudayaan akan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Karena dengan kebutuhan hidup inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Suriasumantri, 1999 : 261).

Berdasarkan pengertian kebudayaan tersebut di atas, maka muncul pertanyaan yang perlu dikaji untuk menyemangati pembangunan dalam konteks nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, yaitu: "*Nilai-nilai budaya apa yang dapat dipakai atau memberi nilai-nilai positif untuk pembangunan ?*"

Kebudayaan merupakan sebuah konsep yang menyatu dalam kehidupan manusia dan merupakan seperangkat sistem pengetahuan atau sistem gagasan yang berfungsi menjadi *blue print* bagi sikap dan perilaku manusia sebagai anggota atau warga dari kesatuan sosialnya, tumbuh, berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia (Sairin, at al, 2002 : 1-2). Paul DiMaggio (1994) menyatakan bahwa aspek budaya terdiri dari 2 bentuk, yaitu: 1) budaya yang bersifat konstitutif (berupa kategori-kategori, skrip/naskah, konsepsi tentang agen, gagasan), 2) budaya yang bersifat regulatif (berupa norma, nilai, rutinitas).

Misalnya, budaya dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dengan pengaruh bagaimana pelaku-pelaku (*actor*) mendefinisikan kepentingannya, termasuk aspek konstitutif, dan jika dengan hambatan ada pada usaha mereka terhadap kepentingan mereka, termasuk aspek regulatif (Damsar, 2002 : 48).

Nilai-nilai budaya adalah jiwa dari kebudayaan dan menjadi dasar dari segenap wujud kebudayaan dalam bentuk tata hidup yang merupakan kegiatan manusia. Allport, Vernon dan Lindzey (1951) mengidentifikasi 6 nilai dasar dalam kebudayaan yaitu: nilai teori, ekonomi, estetika, sosial, politik dan agama. Nilai teori adalah hakikat penemuan kebenaran melalui berbagai metode seperti rasionalisme, empirisme dan metode ilmiah. Nilai ekonomi mencakup kegunaan berbagai benda dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai estetika berhubungan dengan keindahan dan segi-segi *artistic* yang menyangkut bentuk, harmoni dan wujud kesenian yang memberi kenikmatan pada manusia. Nilai sosial berorientasi pada hubungan antar manusia dan penekanan segi-segi kemanusiaan yang luhur. Nilai politik berpusat pada kekuasaan dan pengaruh baik dalam kehidupan masyarakat maupun dunia politik. Nilai agama (moral) merengkuh penghayatan yang bersifat transendental dalam usaha manusia untuk mengerti dan memberi arti bagi kehadirannya di muka bumi (Suriasumantri, 1999 : 263).

Sebagaimana diuraikan di atas nilai-nilai budaya adalah merupakan dasar bagi tata kehidupan masyarakat. Artinya, dalam aspek kehidupan apapun, maka nilai-nilai budaya merupakan acuan untuk bertindak. Dalam pembangunan masyarakat maka nilai-nilai budaya yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan wujud tindakan pembangunan adalah *worldview (pandangan hidup)* dan *etos kerja*.

Teori religiusitas-etos kerja pertama kali dikembangkan oleh Weber (1895). Pengamatan Weber bermula dari fakta sosiologis yang ditemukannya di Jerman, dimana ada perbedaan

yang mencolok dalam kehidupan berusaha (ekonomi) antara penganut agama Katolik dan Protestan. Orang-orang Protestan lebih banyak mempunyai akses pada kegiatan ekonomi dibanding dengan orang-orang Katolik. Dalam mengamati gejala tersebut, Weber menganalisis keterkaitan antara afiliasi agama dan stratifikasi sosial dengan melihat aspek-aspek perilaku dan kelembagaan yang menjadi suatu karakter yang disebutnya *the spirit of capitalism* (semangat kapitalisme). Weber mengemukakan bahwa salah satu ajaran Protestanisme yaitu konsep *panggilan* atau *beruf*. *Beruf* atau panggilan merupakan konsepsi agama mengenai takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan, yaitu harus bekerja. Menurut konsep yang menjadi doktrin Calvinisme ini, jalan hidup yang diterima dari Tuhan tidak melewati moralitas duniawi. Menurut Weber, hal ini jelas berbeda dengan ajaran Katolik, seperti yang diajarkan St. Thomas Aquinas, yang melihat kerja sebagai suatu keharusan untuk mempertahankan hidup (Usman, 2003 : 102-103).

Adapun Adam Smith, menurut West (1992), mengkaitkan hubungan antara moral dengan *supergame* dan berpendapat bahwa *multireligion* lebih baik daripada *monoreligion*. Selanjutnya, beberapa pengamat berusaha membuktikan kebenaran pemikiran Adam Smith dengan membuat hipotesis *multireligion*—kebebasan—pembangunan ekonomi. Walaupun memiliki substansi yang hampir sama, perbedaan antara pemikiran Adam Smith dan Max Weber terletak pada penekanan yang berbeda. Adam Smith mengarah pada *religion* dan moral sedangkan Max Weber mengarah pada *worldview*. Selain itu pemikir yang melanjutkan pemikiran Adam Smith, menggunakan pendekatan kuantitatif, adapun yang meneruskan pemikiran Max Weber cenderung pada pendekatan kualitatif.

Teori Weber telah banyak mempengaruhi jalan pikiran para pakar untuk meneliti tentang keterkaitan antara ajaran agama dan perilaku ekonomi, termasuk di Indonesia. Beberapa di antaranya, sebagaimana dikemukakan oleh

Taufik Abdullah, 1979 (dalam Usman, 2003 : 106-107) adalah:

1. D.M.G. Koch yang meneliti munculnya Sarekat Islam di kalangan pedagang di Surakarta.
2. Schrike (1927) meneliti kemungkinan *afinitas*<sup>1</sup> antara bangkitnya gerakan reformasi Islam di Minangkabau dengan kegairahan kehidupan ekonomi masyarakat yang melibatkan diri dalam ekonomi ekspor.
3. Clifford Geertz dalam studinya di kalangan kaum santri di Mojokuto, Kediri melihat adanya paralelitas dengan berfungsinya *the Protestant ethic*. Menurutnya, kaum santri sedang mengalami reformasi dengan mempersoalkan validitas praktek dan penghayatan agamanya. Kaum santri telah memiliki *the spirit of capitalism* dalam arti **tekun, hemat dan berperhitungan**, tetapi semangat ini tidak mendapat dukungan struktural.
4. Siegel melihat bahwa aktivitas perdagangan di Aceh dibimbing oleh moral pedagang sendiri dan tidak ditentukan oleh ikatan keagamaan (walaupun Aceh sangat kuat dengan tradisi agama Islam). Hubungan dalam usaha dagang tidak berwujud hubungan antar usaha, tetapi antarpribadi, tidak ada hubungan antara majikan dan pegawai, melainkan hubungan induk-semang yang sifatnya pribadi. Di Aceh yang muncul adalah perhitungan dagang di satu pihak dan pandangan terhadap manusia di lain pihak.

Sobary (1989) juga melakukan studi tentang *etos kerja* dan *kesalehan* pada masyarakat Betawi yang beragama Islam di Ciater, Banten. Menurut Sobary, Betawi baru bisa dipahami secara utuh bila kita memahami juga Islam. Upaya memahami gairah keislaman

<sup>1</sup> *Afinitas* adalah ketertarikan atau simpati yang ditandai oleh persamaan kepentingan (KBBI, 2002).

orang Betawi harus dimulai dari *worldview* mereka, bahwa misi hidup di dunia ini yang terpenting adalah untuk ibadah agar bias memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Bagi mereka keselamatan di akhirat bisa dicapai hanya bila mereka selamat juga di dunia sekarang. Untuk memperoleh keselamatan di dunia, menurut mereka, orang **harus bekerja keras, harus hemat, tidak boros tetapi tidak kikir**, dan orang harus juga **rasional** untuk bisa **menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berubah**. Orang saleh adalah orang yang menyeimbangkan *ushalli*<sup>2</sup> dengan usaha secara tersirat. Kesalehan merupakan sumber energi, pendorong gairah kerja. Kesalehan terletak pada *praksis*<sup>3</sup> bukan dalam doa.

Pada kenyataannya, di sekitar kita terdapat pula nilai-nilai budaya yang diperkirakan terkait dengan religiusitas. Masyarakat di pedesaan Jawa memiliki sistim bertolong-tolongan, yang disebut *sambat-sinambat*<sup>4</sup>. Begitu juga dengan pola hubungan kerja di bidang pertanian, yang disebut dengan *maro*, *mertelu*, *merpat*, *ngedok* dan *gade*<sup>5</sup>. Tetapi, menurut Koentjaraningrat, dengan meningkatnya frekuensi mobilitas

penduduk, masuknya gaya hidup perkotaan, dan ketergantungan masyarakat desa terhadap ekonomi pasar telah menimbulkan pergeseran sistim bertolong-tolongan di pedesaan (Nurjaya, 1993). Orang Jawa juga terkenal gigih dan mempunyai semangat tinggi di daerah migrasi dan transmigrasi. Di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, ada satu kecamatan bernama Kecamatan Tanah Jawa, dimana orang-orang Jawa telah bekerja di sana pada perkebunan-perkebunan sejak zaman penjajahan Belanda. Kekompakan mereka telah berhasil menciptakan suatu lembaga, yang disebut *Pujakesuma*<sup>6</sup>. Komunitas keturunan Jawa di Sumatera Utara dengan organisasi Pujakesuma-nya serta dengan pembauran pada penduduk asli setempat, sudah mempunyai strata yang sama dengan suku-suku lainnya, seperti Deli (Pesisir), Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Mandailing dan Nias.

Masyarakat Minangkabau Sumatra Barat yang berada di perantauan juga memiliki etos yang tinggi dan dengan kesadaran yang sangat tinggi mereka memupuk modal untuk membantu pembangunan kampung mereka dengan program *Gerakan Seribu*<sup>7</sup>. Dalam adat-istiadat masyarakat Suku Batak Toba dikenal istilah "*dalihan na tolu*"<sup>8</sup>. Sebagai catatan, nilai eligius orang Batak (khususnya Batak Toba, Simalungun dan Karo) mengadopsi dari *the Protestant ethic*. Hal ini terlihat bahwa di manapun orang Batak berada selalu giat untuk mendirikan rumah-rumah ibadah. Mereka

<sup>2</sup> *Ushalli* adalah niat untuk mengerjakan sholat (KBBI, 2002)

<sup>3</sup> *Praksis* sama artinya dengan *praktik* (kehidupan dan kegiatan praktis manusia) (KBBI, 2002)

<sup>4</sup> *Sambat-sinambat* adalah sistim bertolong-tolongan dalam berbagai kegiatan dengan meminta bantuan tetangga. Istilah lain adalah *bawon* yaitu sistim tolong-menolong dalam bidang pertanian. Konsep yang sama juga dikenal pada masyarakat Batak yang disebut *marsiadapari*.

<sup>5</sup> *Maro* berarti pemilik sawah dan penggarap masing-masing memperoleh satu bagian dari hasil panen, tetapi semua pengeluaran menjadi tanggungan penggarap. *Mertelu* berarti penggarap hanya memperoleh sepertiga bagian hasil panen dan semua pengeluaran menjadi tanggungan penggarap. Jika penggarap hanya menrima seperempat bagian hasil panen tetapi semua pengeluaran ditanggung oleh pemilik sawah disebut *merpat*, dan *ngedok* apabila pengedok memperoleh seperlima sampai sepersepuluh bagian hasil panen dan semua pengeluaran (kecuali tenaga kerja) ditanggung oleh pemilik tenaga kerja. *Gade* berarti jika seorang pemilik sawah menyerahkan penguasaan tanahnya kepada pemberi uang sampai ia mampu mengembalikan uang tersebut.

<sup>6</sup> *Pujakesuma* adalah singkatan dari Putra Jawa Kelahiran Sumatra.

<sup>7</sup> *Gerakan Seribu* adalah suatu upaya untuk mengumpulkan uang Rp 1000 rupiah per tahun dari setiap orang Minangkabau yang ada di perantauan untuk disumbangkan dalam pembangunan kampung mereka.

<sup>8</sup> *Dalihan na tolu* (diterjemahkan: *tungku berkaki tiga*) merupakan struktur organisasi dalam adat Batak yang terdiri dari tiga unsur: 1) *somba marhulahula* (hormat kepada keluarga pihak istri), 2) *manat mardongan tubu* (saling menghargai sesama kerabat: satu marga, tetangga, lingkungan), 3) *elek marboru* (sayang kepada anak perempuan/kemenakan).

menganggap bahwa bekerja itu adalah tuntutan untuk mempertahankan hidup serta terikat pada agama, sehingga nilai yang dianutnya adalah *ora et labora* (berdoa dan bekerja). Dalam konteks ini Suku Batak sangat meyakini *ora et labora* dengan mengatakan *satonga ni tangiang do ulaon*<sup>9</sup>.

Jika dilihat nilai yang terkandung dalam budaya **dalihan na tolu** ini, maka bentuknya bersifat regulatif, yaitu adanya norma yang mengatur struktur organisasi. Dalam kehidupan modern, terutama dalam lingkungan pekerjaan dan bisnis, konsep **dalihan na tolu** telah diaplikasikan, misalnya untuk melakukan kerjasama ekonomi dalam lingkungan keluarga. Tetapi sayangnya sampai sekarang keberhasilan bisnis keluarga orang Batak belum ada yang sampai ke generasi ketiga, karena orang Batak memiliki kecenderungan untuk membagi-bagi harta setelah orangtua mereka meninggal. Selain itu ada nilai budaya tradisional yang negatif dari orang Batak yang masih melekat sampai sekarang pada sesama kerabat dekat, yaitu **elat, teal, late**<sup>10</sup>.

Sifat jelek ini telah membuat sesama orang Batak kurang berhasil dalam berbisnis, berorganisasi, dan melakukan lobi (negosiasi). Bisnis orang-orang Batak lebih cenderung bersifat individu yang terbatas pada keluarga saja dengan kerja keras, terutama di perantaraan.

Aplikasi nilai-nilai budaya di atas, yang lebih menekankan pada nilai-nilai religius dan etos kerja, merupakan proses pengembangan kebudayaan dengan menafsirkan kembali nilai-nilai konvensional agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman serta penumbuhan nilai-nilai baru yang fungsional yang dapat diterapkan untuk memotivasi atau sebagai acuan dalam

pembangunan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai *worldview* dan etos kerja pada setiap individu atau kelompok masyarakat (suku) yang didasari oleh nilai-nilai religius seperti kerja keras, kesalehan, semangat gotong-royong merupakan nilai-nilai budaya perlu dikembangkan dalam pembangunan masyarakat.

Selanjutnya, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah seluruh elemen masyarakat perlu menafsirkan nilai budaya yang dimilikinya sehingga dapat menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sobary (1989), dalam studi tentang etos kerja dan kesalehan pada masyarakat Betawi yang beragama Islam memilih *setting* masyarakat yang belum terjadi transformasi secara sempurna, yaitu di Ciater, Banten. Apa yang dikemukakan oleh M. Sobary tampaknya mengikuti apa yang telah dilakukan Gertz yang meneliti para santri di Mojokuto. Sedangkan Max Weber memilih daerah yang telah tertransformasi sempurna, yaitu masyarakat industri di Jerman.

Dalam perspektif lain, Imam Ghazali (2002) menemukan keterkaitan antara religiusitas dengan komitmen kerja pada karyawan di berbagai perusahaan di Semarang. Kemudian West (1992) mengemukakan beberapa studi yang berusaha membuktikan hipotesa Adam Smith *multireligion—liberty—development* mendapatkan bahwa terdapat korelasi antara negara maju dan agama Katolik/Protestan sebagai agama mayoritas.

Berbagai studi masih mencari format yang tepat efektifitas keterkaitan antara kesalehan dengan etos kerja. Apakah pada seluruh elemen masyarakat ataukah pada elemen tertentu diperlukan program pembangunan yang mengajak masyarakat mentransformasikan nilai-nilai budaya sehingga lebih fungsional untuk mencapai kesejahteraan. Hal itupun ada kemungkinan dipengaruhi oleh validitas studi. Apa yang dilakukan oleh Max Weber, Clifford Geertz, dan M. Sobary mewakili pendekatan '*close up*', yang berusaha mendapatkan informasi secara detail dan rinci. Namun dibalik

<sup>9</sup> Dalam Suku Batak istilah *satonga ni tangiang do ulaon* merupakan suatu keyakinan bahwa separuh dari keberhasilan itu adalah berkat doa. Oleh karena itu, orang yang belum berhasil diyakini sebagai orang yang bekerja tetapi tidak dibarengi doa.

<sup>10</sup> *Elat, teal, late* berarti cemburu, dengki dan tidak menyukai orang lain maju.

itu memiliki konsekuensi tidak didapatkan apa yang disebut 'sampel mewakili populasi'. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai keumuman hasil studi. Secara eksplisit judul studi M. Sobary, yang memuat kata-kata studi kasus menunjukkan hal itu. Adapun pendekatan kuantitatif, seperti dilakukan Imam Ghozali yang mengamati melalui kuesioner terhadap 1000-an orang atau studi yang membuktikan hipotesis Adam Smith melalui data puluhan tahun dan puluhan negara memiliki konsekuensi tidak memiliki kedalaman, kecuali sekedar membuktikan hipotesis, dan tidak menyentuh akar permasalahan hubungan antara kesalehan dan etos kerja.

### PENUTUP

Pembangunan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh indikator ekonomi dan indikator sosial lainnya dan dimensi pembangunan masyarakat dimana diperlukan perubahan-perubahan yang bersifat kultural (budaya), struktural, politik, partisipatif, dan berkesinambungan, menuju kualitas hidup yang lebih baik. Permasalahannya adalah kedua dimensi tersebut terpisah. Seharusnya keduanya berada dalam satu kesatuan, ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Para pemikir yang mengedepankan pembangunan masyarakat tetap berada pada posisi yang benar karena masih berada dalam konteks pembangunan masyarakat. Demikian juga para pemikir pembangunan ekonomi. Tetapi langkah awal, menurut penulis, adalah bagaimana membangun jiwa dan raga masyarakat agar masyarakat mudah mengembangkan diri untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonominya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut tanpa meninggalkan karakteristik dasar. Karakteristik dasar yang dimaksud adalah *nilai-nilai budaya*. Pembangunan melalui penggalan nilai-nilai budaya adalah syarat mutlak untuk warga masyarakat dapat cepat tumbuh, terbangun dan berkembang. Karena di dalam nilai-nilai budaya terdapat etos kerja dan *worldview* untuk

bertindak yang masih dianut serta terdapat juga proses penciptaan mental dan intelegensia untuk meningkatkan kualitas hidup. Nilai-nilai *worldview* dan etos kerja seperti kerja keras, kesalehan, semangat gotong-royong merupakan nilai-nilai budaya yang perlu digali dan dikembangkan dalam pembangunan. Keduanya merupakan potensi yang memiliki probabilitas untuk ditafsirkan kembali sehingga menjadi fungsional dalam mewujudkan kesejahteraan.

Studi-studi selanjutnya seharusnya menemukan nilai-nilai budaya berupa etos kerja dan *worldview* yang masih dianut serta terdapat juga proses penciptaan *mental* dan *intelegensia* untuk meningkatkan kualitas hidup. Menemukan pula bagaimana nilai-nilai budaya tersebut dapat ditafsirkan kembali sehingga memiliki nilai fungsional untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya diharapkan ditemukan pula individu dan kelompok masyarakat yang menjadi target program-program penafsiran nilai-nilai budaya, sehingga pembangunan menjadi efektif dan efisien.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit YKPN.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Ferguson, Ronald F. dan William T. Dickens. 2001. "Urban Problems and Community Development". *Journal of The American Planning Association*, Spring 2001, Vol.67, No.2, pp.236-237.
- Ghozali, Imam. 2002. "Pengaruh Religiusitas Terhadap Komitmen Organisasi, Keteliban Kerja, Kepuasan Kerja dan Produktivitas". *Jurnal Bisnis Strategi* Vol 9/Juli/Th VII/ 2002. pp 1-13
- Gittel, Ross, Avis Vidal. 2001. "Community Organizing : Building Social capital as a Development Strategy". *Journal of the American Planning Association*, Summer 2001, Vol.67, No.3, pp. 344-345.

- Hakim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia. FE UII.
- Ingham, Barbara. 1993. "The Meaning of Development: Interactions Between New and Old Ideas", *World Development*, Vol. 21, No. 11, pp.1803-1821.
- Kalangie, Nico S.. 1999. "Akankah Pembangunan Sosial di Indonesia Berkembang?", *Antropologi Indonesia* No. 59/1999, hal. 3-6.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. 2002. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Maskun, Sumitro H. 1994. *Pembangunan Masyarakat Desa: Azas, Kebijaksanaan, dan Manajemen*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Media Widya Mandala.
- Meier, Gerald. M. 1995. *Leading Issues in Economic Development*. Oxford: Oxford University Press
- Murtopo, Ali. 1982. *Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Nurjaya, I Nyoman. 1993. *Masalah Jaminan Sosial di Pedesaan: Kasus Jawa*, (dalam *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Penyunting: Sofian Efendi, Sjafri Sairin, Alwi Dahlan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- Pretty, Jules N. 1995. "Participatory Learning For Sustainable Agriculture". *World Development* Vol. 23, No. 8, pp.1247-1263.
- Saegert, Susan, Philip Thompson, Mark R. Warren. 2003. "Social Capital and Poor Communities". *Journal of The American Planning Association*, Winter 2003, Vol.69, No.1, pp.95-96.
- Sairin, Sjafri, Pujo Semedi, Bambang Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sobary, Muhamad. 1989. *Kesalehan, Etos Kerja dan Tingkah Laku Ekonomi: Studi Kasus Sektor Informal di Ciater*, (dalam *Membangun Martabat Manusia: Peranan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pembangunan*, Penyunting: Sofian Efendi, Sjafri Sairin, Alwi Dahlan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).
- Suriasumantri, Jujun S. 1999. *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan.
- Surjadi. 1983. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Usman, Sunyoto. 2003. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Weber, Max. 1895. *The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism*. Telah diterjemahkan menjadi *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* oleh Pustaka Prometheus Surabaya pada tahun 2000.
- West, Edwin G. 1992. *Adam Smith and Modern Economics*. Vermont: Edward Elgar Publishing Company